



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 463/Kep.661-DP3AKB/2019
TENTANG

FORUM KLINIK PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2019-2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam Pengarusutamaan Gender perlu dilakukan upaya untuk mempercepat proses penyusunan rencana pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dibentuk Forum Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 55);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara PP dan PA RI nomor 270/M.PPN/11/2012 Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarsutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 474.24/40/bapp dan Nomor 474.24/41/bapp tanggal 15 mei 2018 tentang Percepatan Program Pengarusutamaan Gender di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023, yang selanjutnya disebut Forum Klinik PPRG, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Klinik PPRG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan masukan untuk penganggaran dalam rencana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Klinik PPRG mempunyai fungsi:
- a. kajian dan analisis dalam rangka perencanaan penganggaran Responsif Gender;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. perumusan perencanaan penganggaran responsif gender sebagai saran dan masukan penyusunan anggaran responsif gender bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Klinik PPRG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 463/Kep.661-DP3AKB/2019

TANGGAL : 19 Agustus 2019

TENTANG : FORUM KLINIK PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER (PPRG) PROVINSI JAWA
BARAT PERIODE 2019-2023.

SUSUNAN PERSONALIA

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- Pembina : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
- Anggota : 1. Hana Makmun, S.H., M.H. (Widyaswara pada Dinas
Provinsi Jawa Barat Pendidikan Pemerintah Daerah Jawa Barat);
2. Dr.Pribowo, M.Pd (Sekolah Tinggi Kesejahteraan
Sosial)
3. Dr. Bambang Rustanto M.Hum (Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial).
4. Dr. Neni Rostini (Universitas Padjadjaran).
5. Dr. Neni Faperta (Universitas Padjadjaran).
- Kabupaten Ciamis : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP2KBp3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Dr. Ida Farida, S.H., M.H. (Wakil Rektor III pada
Universitas Galuh Pemerintah Daerah Kabupaten
Ciamis).
3. Dr. Ati Rosliyati, SE., MM., AK (Dekan pada Fakultas
Ekonomi Universitas Galuh di Daerah Kabupaten
Ciamis).
- Kota Sukabumi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3APM)
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
2. Dr. Amalia Nurmillah. SP., MP (Universitas
Muhamadiyah/UMMI di Daerah Kota Sukabumi).
3. Dr. Reni Mulyani, M.Si (UMMI di Daerah Kota
Sukabumi).

- Kabupaten Kuningan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Erna Juherna, M.Pd.I (Ketua Prodi PG PAUD STKIP Muhammadiyah di Daerah Kuningan).
3. Suwari Akhmad Dhian, S.H., M.H. (Ketua FKBH Universitas Kuningan/Uniku di Daerah Kabupaten Kuningan).
- Kabupaten Bandung : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dr. Erham Wilda, M. Pd (Pusat Studi Wanita/PSW UNISBA di Daerah Kota Bandung).
3. Ririn Dewi Wulandari, S.E, M.M. (PSW Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan/STIKES Aisyiah di Daerah Kota Bandung).
- Kota Cimahi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Dr. Santi Pramita SE, MSi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani di Daerah Kota Cimahi).
3. Ayu Riana Sari, MSi. Psik (Fakultas Psikologi Unjani di Daerah Kota Cimahi).
- Kota Tasikmalaya : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Dr. Atit Tajmiati, M.Pd (Poltekes Kemenkes di Daerah Kota Tasikmalaya)
3. Nunung Mulyani APP.M.Kes (Poltekes Kemenkes di Daerah Kota Tasikmalaya)
- Kabupaten Cianjur : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H. (Dosen pada Universitas Suryakencana di Daerah Kabupaten Cianjur).
3. Yuyun Yulianah S.H., M.H. (Dosen pada Universitas Suryakencana di Daerah Kabupaten Cianjur).

- Kabupaten Tasikmalaya : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Haryani Sulistioningsih, S.KM, M.KM (STIKES RESPATI di Daerah Kabupaten Tasikmalaya)
3. Lilis Lismayanti, M.Kep (UNTAS di Daerah Kabupaten Tasikmalaya)
- Kabupaten Garut : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
2. Dr. Hj.Ike Kania. M.Si (Universitas di Daerah Kabupaten Garut).
3. Prof. Dr. Ieke Sartika Iriani, MS (Universitas di Daerah Kabupaten Garut).
- Kabupaten Bandung Barat : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Dr. Hj Deti M. M.PD (Uninus di Daerah Kota Bandung).
3. Rinrin Nurfaidah, M.M.PD (STKIP Siliwangi).
- Kota Bandung : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak (DP3AKM Pemerintah Daerah Kota Bandung).
2. Binahayati Rusidi., MSW, PHD (PSW Universitas Padjajaran di Daerah Kota Bandung).
3. Antik Bintari, S.IP., M.T. (PSW Universitas Padjajaran di Daerah Kota Bandung).
- Kabupaten Bogor : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Ir. Margaharta Iskandar, M.Sc.(Institut Pertanian Bogor).
3. Ratmajaya, S.E. (Institut Pertanian Bogor).
- Kabupaten Indramayu : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Hilal Hilmawan, S.IP, M.IP (PSW Universitas Wiralodra/UNWIR di Daerah Kabupaten Indramayu).

3. Nurhayati, S.H., M.H., (PSW UNWIR di Daerah Kabupaten Indramayu).
- Kabupaten Purwakarta : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Eti Jumiati S.E., M.M. (Dosen STIE Wikara di Daerah Kabupaten Purwakarta).
 3. Nopy Yulianty, M.Psi (Dosen STIKES Efarina Etaham di Daerah Kabupaten Purwakarta).
- Kota Banjar : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) di Daerah Kota Banjar.
2. Rahardi Mahardika, Skep., M.M. (STIKES Binaputra di Daerah Kota Banjar).
 3. Tina Cahya Mulyatin, S.IP, M.Si (STISIP Bina Putra di Daerah Kota Banjar).
- Kota Bogor : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Sriwulan Ferendian Paletchan, S.Pi, M.Si (IPB).
 3. Raden Radmadjaya (IPB).
- Kabupaten Karawang : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Dewi Siti Aisyah, S.Pd.I, M.Pd (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa di Daerah Kabupaten Karawang).
 3. Ina Ratnasari, SE, MM (Dosen Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa di Daerah Kabupaten Karawang).
- Kabupaten Subang : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Sri Nurcahyani, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas di Daerah Kabupaten Subang).
 3. Nuraida, S.IP, M.Si (Universitas di Daerah Kabupaten Subang).
- Kabupaten Sumedang : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pupung Rahayu (Dosen Prodi PGSD STKIP di Daerah Kabupaten Sumedang).

3. Yusfita Yusuf, S.Pd.M.Pd (Asosiasi Pendidikan Matematika Indonesia AAPMI).
- Kabupaten Cirebon : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Muhammad Komaludin M.Hum (Universitas Muhamadiyah di Daerah Kota Cirebon).
 3. Uun Machsunah, M.M. (Universitas Muhamadiyah di Daerah Kabupaten Cirebon).
- Kota Depok : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak Pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Pemerintah Daerah Kota Depok.
2. Prof Euis Sunarti (Penggiat Keluarga/Giga Indonesia).
 3. Dra. Siti Nurhidayati Psi, MSi (Penggiat Keluarga/Giga Indonesia).
- Kota Bekasi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
2. Andi Sopandi, M.Si (Universitas Islam Empat Lima di Daerah Kota Bekasi).
 3. Novrian , S.Sos M Ikom (Universitas Islam Empat Lima di Daerah Kota Bekasi) .
- Kabupaten Sukabumi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Sistiana Windyariani, MPd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Daerah Kabupaten Sukabumi).
 3. Astri Sutisnawati, MPd (Ketua Prodi PGSD di Daerah Kabupaten Sukabumi).
- Kota Cirebon : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
2. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE,MMAK,CA (Dekan Fakultas Ekonomi Unswagati di Daerah Kota Cirebon).
 3. Devi Siti Sihatul Afiah M.Pd (Dosen Prodi Bahasa Inggris Unswagati di Daerah Kota Cirebon).

- Kabupaten Pangandaran : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Dr. Eva Nuriyah Hidayat, S.Sos., M.Si (Universitas Galuh di Daerah Kabupaten Ciamis).
3. Mamay Komariah, S.H., M.H. (Universitas Galuh di Daerah Kabupaten Ciamis).
- Kabupaten Majalengka : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Dr. Aceng Jarkasih Drs.M.BA.M.Si (Dekan Fisip Universitas di Daerah Kabupaten Majalengka).
3. Eli Ahmad Mahiri,SH.MM (Universitas Majalengka).
- Kabupaten Bekasi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi).
2. Suharjuddin S.Pd.,M.Pd. (Dosen Universitas Bhayangkara di Daerah Kabupaten Bekasi).
3. Dr. Retno Purwani Setyaningrum, S.E., M.M. (Dosen Universitas Pelita Bangsa di Daerah Kabupaten Bekasi)

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 463/Kep.661-DP3AKB/2019
TANGGAL : 19 Agustus 2019
TENTANG : FORUM KLINIK PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER (PPRG) PROVINSI JAWA
BARAT PERIODE 2019-2023.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah:
memberikan nasihat, saran, pendapat dan arahan kepada Forum Klinik PPRG.
- II. Pembina:
 - a. melakukan pembinaan dan arahan kebijakan rencana tindak Forum Klinik PPRG; dan
 - b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Forum Klinik PPRG.
- II. Ketua:
 - a. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan Forum Klinik PPRG secara umum;
 - c. melakukan pelaporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. merumuskan kebijakan pelaksanaan rencana tindak Forum Klinik PPRG.
- III. Sekretaris:
 - a. membantu ketua dalam tugas penyelenggaraan Forum Klinik PPRG;
 - b. mewakili ketua mengoordinasikan Forum Klinik PPRG;
 - c. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan;
 - d. mengagendakan kegiatan Forum Klinik PPRG; dan
 - e. memfasilitasi seluruh kegiatan Forum Klinik PPRG.
- IV. Anggota:
 - a. melakukan kajian dan analisis terkait Perencanaan Penganggaran responsif gender; dan
 - b. merumuskan perencanaan penganggaran responsif gender.
- V. Sekretariat:
 - a. membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Forum Klinik PPRG; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL